

“Kalau gempa itu takdir, kenapa lubang galian yang menelan balita juga kita sebut takdir?”

Diskusi terbuka. Boleh kamu setuju, boleh kamu bantah — yang penting kamu pikir.

"Bencana Alam atau Bencana Kelalaian?"

Pekan ini linimasa dipenuhi kabar bencana yang, kalau diperhatikan, sebenarnya berasal dari dua dunia yang berbeda. Di satu sisi ada gempa dahsyat yang meruntuhkan gedung dan menelan ribuan nyawa di sebuah negeri jauh, serta gelombang panas yang membunuh ratusan orang tua di kota-kota besar. Di sisi lain ada tempat pembuangan sampah yang terbakar hingga membuat ratusan warga terkena gangguan pernapasan, dan sebuah lubang galian proyek yang dibiarkan menganga hingga menelan seorang balita di Jakarta.

Bahasa publik menyamakan keduanya dengan satu kata: musibah. Namun apakah keduanya benar-benar setara secara moral? Pertanyaan ini bukan main-main, sebab cara sebuah masyarakat mengklasifikasikan penderitaan menentukan siapa yang dianggap bertanggung jawab — dan siapa yang dibiarkan lolos.

Lensa pertama, dari teologi klasik, membedakan antara *qadha* yang murni dan sebab yang dapat diusahakan. Gempa dan pergerakan lempeng adalah wilayah yang di luar jangkauan manusia; ia diterima sebagai ujian. Namun tradisi Islam sejak awal tidak pernah menjadikan takdir sebagai alasan menghapus tanggung jawab sebab-akibat: Umar bin Khattab, ketika ditanya apakah ia lari dari takdir Allah saat menghindari wabah, menjawab bahwa ia lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Implikasinya, menyebut lubang galian yang tak diamankan sebagai "takdir" adalah penyalahgunaan konsep. Celah lensa ini: batas antara "sebab yang bisa diusahakan" dan "yang murni takdir" tidak selalu jelas — apakah kemiskinan yang memaksa orang tinggal di zona rawan termasuk sebab atau takdir? Pertanyaan yang muncul: di mana garis tanggung jawab ditarik ketika kelalaian dan keterbatasan berkelindan?

Lensa kedua, dari sosiologi risiko, menawarkan istilah yang tajam: bencana sering kali bukan peristiwa alam, melainkan kegagalan sistem yang tersingkap oleh peristiwa alam. Sampah yang menumpuk bertahun-tahun tanpa pengelolaan bukanlah kecelakaan; ia adalah keputusan kolektif yang ditunda. Ketika ia akhirnya terbakar, yang terbakar sesungguhnya adalah akumulasi kelalaian. Implikasinya, "bencana alam" kerap menjadi selubung yang menyembunyikan keputusan manusia. Celah lensa ini: fokus pada sistem bisa mengaburkan tanggung jawab individu, seolah "sistem" adalah entitas tanpa wajah yang tak seorang pun perlu mempertanggungjawabkan. Pertanyaan yang muncul: bagaimana membagi tanggung jawab antara

struktur yang gagal dan orang-orang konkret yang mengambil keputusan di dalamnya?

Lensa ketiga, dari etika lingkungan Islam, memakai konsep *istikhlaf* — manusia sebagai khalifah, penjaga bumi, bukan pemiliknya. QS. Al-A'raaf: 74 dengan tegas melarang *al-'atsu fil-ardhi mufsidin*, merajalela membuat kerusakan, bahkan sambil membangun peradaban. Dalam kerangka ini, mencemari udara dan air bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan pengkhianatan atas amanah kosmis. Implikasinya, merawat lingkungan naik kelas dari pilihan gaya hidup menjadi kewajiban keagamaan berjenis *fardh kifayah*. Celah lensa ini: bahasa amanah yang terlalu abstrak bisa berhenti sebagai retorika mimbar tanpa terjemahan kebijakan konkret. Pertanyaan yang muncul: bagaimana konsep khilafah diterjemahkan menjadi mekanisme akuntabilitas yang mengikat, bukan sekadar imbauan moral?

Lensa keempat, dari psikologi kolektif, mengamati mengapa masyarakat lebih mudah tergerak oleh gempa di negeri jauh daripada oleh lubang galian di kota sendiri. Bencana spektakuler memicu empati instan; bencana lambat dan struktural — kemarau yang merambat, sampah yang menumpuk, udara yang perlahan memburuk — cenderung diabaikan karena tidak punya momen dramatis. Implikasinya, perhatian publik terdistribusi secara tidak adil, mengalir deras ke yang fotogenik dan menetes tipis ke yang kronis. Celah lensa ini: kesadaran akan bias ini belum tentu mengubah perilaku; orang bisa tahu bahwa ia bias dan tetap bertindak sesuai bias itu. Pertanyaan yang muncul: apa yang membuat sebuah krisis lambat cukup terasa mendesak untuk memicu tindakan sebelum ia meledak?

Pada tataran praktis, mahasiswa punya ruang yang sering diremehkan. Di kos, memisahkan sampah dan mengelola minyak jelantah bekas adalah eksperimen kecil yang bisa didokumentasikan dan dibagikan. Di kampus, alih-alih menunggu kebijakan turun, kelompok studi bisa memetakan titik-titik rawan di lingkungan sekitar — saluran air yang tersumbat, lahan yang beralih fungsi — dan menyusun catatan yang

bisa diajukan ke pengelola. Di ruang diskusi jurusan, membedah satu kasus bencana lokal dengan pertanyaan "mana yang takdir, mana yang kelalaian" melatih ketajaman moral yang jauh lebih berguna daripada perdebatan abstrak. Yang konkret dan berukuran kecil lebih mungkin bertahan daripada resolusi besar yang menguap setelah sepekan.

Pada akhirnya, membedakan bencana alam dari bencana kelalaian bukan latihan menyalahkan, melainkan latihan menempatkan tanggung jawab pada tempatnya. Yang penting bukan menemukan satu jawaban final tentang di mana garis takdir berakhir dan kelalaian dimulai, melainkan memahami bahwa lensa apa pun yang dipilih sebagai prioritas, selalu ada lensa lain yang menutupi celahnya — dan kesadaran itulah yang menjaga kita dari kemewahan menyebut segala penderitaan sebagai "sudah takdir".

| Pertanyaan

Q · 01

Bukankah menyebut lubang galian sebagai kelalaian manusia itu terlalu keras? Kecelakaan kan bisa terjadi pada siapa saja.

A

Sebagian benar — tidak semua kecelakaan bisa diprediksi. Tapi ada perbedaan antara kecelakaan murni dan bahaya yang diketahui namun dibiarkan. Lubang tak berpengaman di area padat bukan risiko acak; ia adalah pilihan untuk tidak memasang pengaman. Menyebutnya kelalaian bukan menghakimi orang per orang, melainkan menamai kondisi yang bisa dan seharusnya diperbaiki.

Q · 02

Kenapa agama harus ikut campur soal sampah dan lingkungan? Itu kan urusan teknis, bukan urusan iman.

A

Justru pemisahan tajam antara "teknis" dan "iman" itu yang perlu dipertanyakan. Tradisi Islam memandang perbuatan di ruang publik sebagai bagian dari akhlak. Melarang membuat kerusakan di bumi adalah teks, bukan tafsir bebas. Agama tidak menggantikan solusi teknis; ia memberi alasan mengapa solusi teknis itu wajib ditegakkan, bukan opsional.

Q · 03

Bukankah mengaitkan bencana dengan dosa manusia itu berbahaya dan bisa menyalahkan korban?

A

Betul, dan itu bahaya nyata yang harus dihindari. Membedakan kelalaian sistemik dari azab individual adalah kunci. Menamai kelalaian pengelolaan sampah berbeda total dari menuduh korban gempa sebagai pendosa. Yang pertama menuntut perbaikan struktur; yang kedua adalah penghakiman yang justru dilarang. Garis itu harus dijaga ketat.

Q · 04

Apa bedanya artikel ini dengan imbauan moral generik "ayo jaga lingkungan"?

A

Perbedaannya pada penolakan untuk berhenti di imbauan. Imbauan generik menaruh beban pada niat baik individu; analisis ini menempatkan pertanyaan pada distribusi tanggung jawab dan akuntabilitas. Ia tidak berkata "jadilah baik", melainkan bertanya "siapa yang harus mempertanggungjawabkan apa, dan lewat mekanisme apa" — yang jauh lebih tidak nyaman.

Saya tidak terlalu religius. Apakah kerangka khilafah dan amanah ini masih relevan buat saya?

A

Kerangka itu bisa dibaca sebagai bahasa tanggung jawab antargenerasi, terlepas dari keyakinan pribadi. Gagasan bahwa bumi dititipkan, bukan dimiliki, punya padanan dalam etika sekuler tentang keberlanjutan. Yang ditawarkan di sini adalah kosakata yang kebetulan berakar agama, tapi masalah yang dinamainya — kelalaian kolektif atas ruang bersama — dialami semua orang, religius maupun tidak.